



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM**



LAPORAN KEUANGAN

TRIWULAN III



UAKPA (108266)

2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 17 Oktober 2024
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jusman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 17 Oktober 2024
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jusman

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Triwulan III TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.000.054.779,00 atau mencapai 201 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp996.300.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2024 adalah sebesar Rp90.994.500.014,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp192.050.458.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024. Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.024.316.421.221,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.654.001.978,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.021.464.391.943,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp198.027.300,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.159.329.916,00 dan Rp1.024.316.421.221,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.515.269.754,00

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp82.010.238.369,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp80.494.968.615,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp194.024.099,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp80.300.944.516,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.011.523.714.801,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp80.300.944.516,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp43.821.090,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp88.978.142.110,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp1.020.157.091.305,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III TA 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2024		%	TA 2023
		Anggaran	Realisasi di Atas (Di Bawah)		Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	996.300.000	2.000.054.779	201	1.051.689.361
Jumlah Pendapatan dan Hibah		996.300.000	2.000.054.779	201	1.051.689.361
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	21.303.518.000	16.486.300.930	77	15.578.475.683
Belanja Barang	B.4	84.447.682.000	52.817.252.458	63	76.726.417.497
Belanja Modal	B.5	86.299.258.000	21.690.946.626	25	5.963.134.995
Jumlah Belanja		192.050.458.000	90.994.500.014	47	98.268.028.175

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM NERACA PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	325.000.000	300.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.901.216.545	9.665.458.248
Persediaan	C.10	427.785.433	262.418.030
JUMLAH ASET LANCAR		2.654.001.978	10.227.876.278
ASET TETAP			
Tanah	C.14	687.998.681.000	687.998.681.000
Peralatan dan Mesin	C.15	88.682.748.803	81.234.579.188
Gedung dan Bangunan	C.16	331.773.750.357	293.957.524.733
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	13.275.880.497	12.359.677.154
Aset Tetap lainnya	C.18	1.450.949.267	1.351.026.622
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	16.758.876.814	2.244.662.312
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.20	(118.476.494.795)	(97.869.747.239)
JUMLAH ASET TETAP		1.021.464.391.943	981.276.403.770
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.476.732.100	1.476.732.100
Aset Lain-Lain	C.22	2.649.718.096	4.887.112.664
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.23	(3.928.653.723)	(5.829.751.564)
JUMLAH ASET LAINNYA		197.796.473	534.093.200
JUMLAH ASET		1.024.316.190.394	992.038.373.248
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	3.490.653.723	12.925.273.359
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	343.676.193	2.220.669.412
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.27	325.000.000	300.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	-	10.940.319
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4.159.329.916	15.456.883.090
JUMLAH KEWAJIBAN		4.159.329.916	15.456.883.090
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	1.020.157.091.305	976.581.490.158
JUMLAH EKUITAS		1.020.157.091.305	976.581.490.158
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.024.316.421.221	992.038.373.248

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.515.269.754	1.009.718.698
JUMLAH PENDAPATAN		1.515.269.754	1.009.718.698
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.749.601.108	16.798.687.531
Beban Persediaan	D.3	949.722.936	625.776.449
Beban Barang dan Jasa	D.4	31.925.385.443	50.487.063.952
Beban Pemeliharaan	D.5	8.900.960.647	5.805.551.039
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.057.246.664	21.969.173.331
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	11.428.941.279	10.716.693.555
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(1.619.708)	-
JUMLAH BEBAN		82.010.238.369	106.402.945.857
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(80.494.968.615)	(105.393.227.159)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	180.060.099	(1.198.809.402)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya	D.12	13.964.000	556.320
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	194.024.099	(1.198.253.082)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR		(80.300.944.516)	(106.591.480.241)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(80.300.944.516)	(106.591.480.241)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	1.011.523.714.801	985.775.385.185
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(80.300.944.516)	(106.526.725.241)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			116.491.400
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.6	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.7	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.8	(43.821.090)	116.491.400
LAIN-LAIN	E.9	-	-
JUMLAH		(43.821.090)	116.491.400
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	88.978.142.110	97.216.338.814
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		8.633.376.504	9.193.895.027
EKUITAS AKHIR	E.14	1.020.157.091.305	976.581.490.158

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak

lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevant*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan

disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

• **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

➤ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

➤ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(8) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Triwulan III TA 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	30 September 2024	
	Anggaran	Anggaran
	Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	996.300.000	996.300.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	996.300.000	996.300.000
Belanja		
Belanja Pegawai	20.367.931.000	21.303.518.000
Belanja Barang	80.673.280.000	84.447.682.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	86.359.604.000	86.299.258.000
Jumlah Belanja	187.400.815.000	192.050.458.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp2.000.054.779,
00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp2.000.054.779,00 atau mencapai 200,75% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp996.300.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
BPSDM Hukum dan HAM per 30 September 2024

Uraian	30 September 2024		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65.755.000	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	114.305.099	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90.000.000	220.314.000	244,79
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	906.300.000	906.300.000	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	355.475.097	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13.964.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	323.941.583	0
Jumlah	996.300.000	2.000.054.779	200,75

Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM antara lain :

- a. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari penjualan peralatan dan mesin, juga atas sewa tanah, gedung dan bangunan serta pemindahtanganan BMN lainnya.
- b. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berasal dari Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- c. Pendapatan Lain-lain yang berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia per 30 September 2024 dan 30 September 2023:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	65.755.000	0	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	114.305.099	93.577.664	22,15
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	220.314.000	51.255.377	329,84
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	906.300.000	906.300.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	355.475.097	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	13.964.000	556.320	2.410,07
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	323.941.583	0	-
Jumlah	2.000.054.779	1.051.689.361	90,18

Realisasi Pendapatan 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 90,18% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 30 September TA 2023. Kenaikan signifikan ini disebabkan adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pengelolaan BMN terdiri dari:
 - a. Realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp65.755.000,00 berupa lelang atas peralatan dan mesin.
 - b. Realisasi pada Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp 114.305.000,00 berupa lelang 3 minibus.
 - c. Realisasi pada Akun [425131] Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp220.314.000,00 atas sewa Auditorium, Kamar Flat, Kamar Asrama, Sewa Ruangan Kantin.
2. Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan terdiri atas diterimanya PNPB Pelatihan Jabatan Fungsional Penyusunan dan Perancang Perundang-undangan sebesar Rp906.300.000,00.
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp355.475.097,00 atas Denda Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM.
4. Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp13.964.097,00 dikarenakan pengembalian belanja pegawai pada pengembalian gaji induk atas nama Wirdah Rahmi. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp323.941.583,00 merupakan penyetoran kembali ke Kas Negara atas kelebihan belanja modal berupa Gedung Rektorat sebesar Rp 238.009.337,00 dan penyetoran kembali ke Kas Negara atas kelebihan belanja modal atas Lapangan Tenis Indoor sebesar Rp 85.932.246,00.

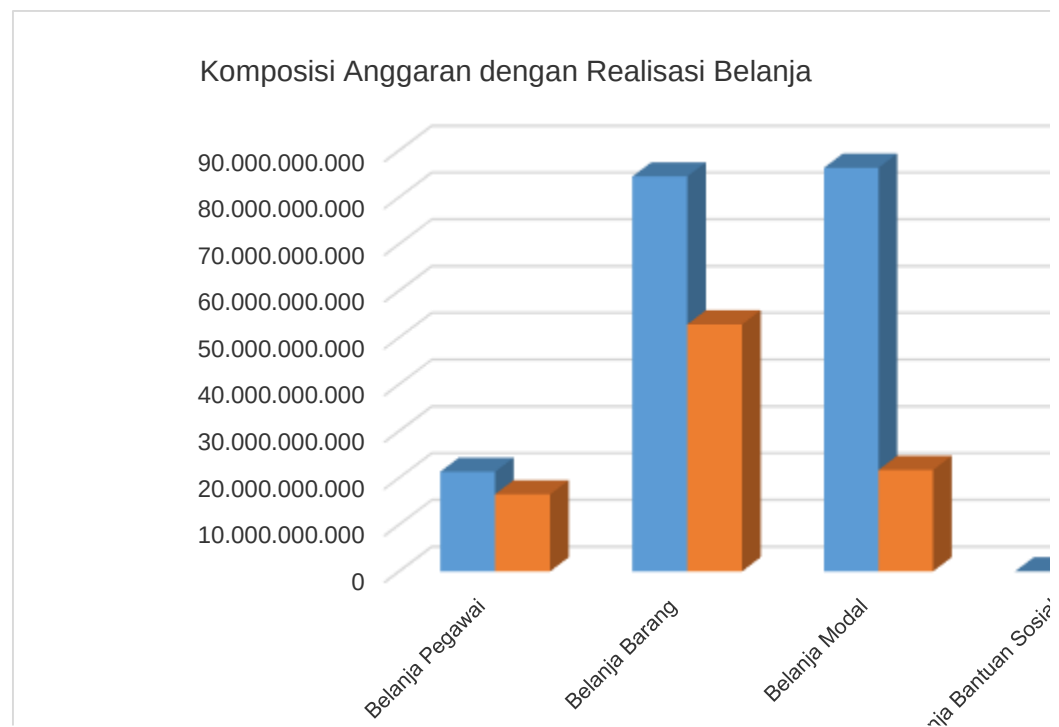
B.2. BELANJA

<i>Realisasi Belanja Rp90.994.500. 014,00</i>	Realisasi Belanja pada 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp90.994.500.014,00 atau 47,38% dari anggaran belanja sebesar Rp192.050.458.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 September TA 2024 adalah sebagai berikut:
---	---

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2024

Uraian	TA 2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	21.303.518.000	16.486.300.930	77,39
Belanja Barang	84.447.682.000	52.817.252.458	62,54
Belanja Modal	86.299.258.000	21.690.946.626	25,13
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	192.050.458.000	90.994.500.014	47,38
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	192.050.458.000	90.994.500.014	47,38

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 30 September TA 2023, Realisasi Belanja pada 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,40%. Peningkatan realisasi terjadi pada Belanja modal atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Berikut perbandingan realisasi belanja per 30 September 2024 dengan realisasi belanja per 30 September 2023 :

Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 September 2024 dan 30 September 2023

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Relisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	16.486.300.930	15.578.475.683	5,83
Belanja Barang	52.817.252.458	76.726.417.497	(31,16)
Belanja Modal	21.690.946.626	5.963.134.995	263,75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	90.994.500.014	98.268.028.175	(7,40)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp16.500.478.720,00*

Realisasi Belanja Pegawai 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.500.478.720,00 dan Rp15.578.475.683,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 September 2024 dan 30 September 2023

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	15.227.122.695	15.222.272.683	0,03
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	604.335.235	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	654.843.000	356.203.000	(45,60)
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah	16.486.300.930	15.578.475.683	5,83

Realisasi belanja pegawai 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,92% dibandingkan 30 September TA 2023.

*Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
per 30 September 2024*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.500.362.000	10.597.034.000	6.373.200	10.590.660.800	78,49
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	201.000	162.528	7.590	154.938	80,86
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	857.172.000	671.301.850	637.320	670.664.530	78,32
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	236.226.000	186.484.860	-	186.484.860	78,94
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	293.255.000	246.165.000	-	246.165.000	83,94
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.890.425.000	1.485.188.000	370.000	1.484.818.000	78,56
511125	Belanja Tunj. PPH PNS	214.347.000	200.105.187	-	200.105.187	93,36
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	621.361.000	488.328.060	289.680	488.038.380	78,59
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.554.622.000	1.159.531.000	-	1.159.531.000	74,59
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	265.070.000	207.000.000	6.500.000	200.500.000	78,09
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	637.648.000	446.352.900	-	446.352.900	70,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	4.995	-	4.995	55,50
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	21.318.000	14.921.900	-	14.921.900	70,00
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	5.668.000	3.967.600	-	3.967.600	70,00
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	61.750.000	43.225.000	-	43.225.000	70,00
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	26.072.000	18.249.840	-	18.249.840	70,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	144.872.000	77.613.000	-	77.613.000	53,57
512211	Belanja Uang Lembur	806.100.000	643.241.000	-	643.241.000	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	167.040.000	11.602.000	-	11.602.000	6,95
	Jumlah	21.303.518.000	16.500.478.720	14.177.790	16.486.300.930	77,45

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja pegawai per 30 September 2024 yang disebabkan antara lain oleh adanya pegawai PPPK masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pegawai yang mutasi menjadi JFT dan promosi menjadi Pejabat Struktural. Pengembalian atas pembulatan gaji dan terlanjur bayar gaji dikarenakan penyampaian SK terlambat.

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp52.817.252.
458,00*

Realisasi Belanja Barang 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.817.252.458,00 dan Rp76.726.417.497,00. Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang satker BPSDM Hukum dan HAM per 30 September

TA 2024 mengalami penurunan sebesar 31,16% dari 30 September TA 2023. Realisasi Belanja Barang per 30 September 2024 sebesar 62.54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp84.447.682.000,00. Hal ini disebabkan pelaksanaan pelatihan yang lebih banyak diselenggarakan secara online dibandingkan dengan pelatihan yang diselenggarakan secara klasikal sehingga tidak bisa merealisasikan belanja barang keperluan penyelenggaraan diklat tersebut.

Berikut tabel perbandingan realisasi belanja barang BPSDM Hukum dan HAM per 30 September 2024 dan 30 September 2023.

*Perbandingan Belanja Barang
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	14.678.606.864	8.481.774.232	73,06
Belanja Barang Non Operasional	6.358.645.902	30.016.765.041	(78,82)
Belanja Persediaan	623.497.555	415.042.525	50,22
Belanja Jasa	11.022.812.759	10.280.741.519	7,22
Belanja Pemeliharaan	9.254.127.714	5.678.609.849	62,96
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.879.561.664	21.853.484.331	(50,22)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	-	-	-
Jumlah	52.817.252.458	76.726.417.497	(31,16)

Realisasi Belanja Barang per 30 September 2024

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
5211	Belanja Barang Operasional	20.800.007.000	14.678.606.864	-	14.678.606.864	70,57
5212	Belanja Barang Non Operasional	12.090.530.000	6.358.645.902	-	6.358.645.902	52,59
5218	Belanja Persediaan	1.080.684.000	623.497.555	-	623.497.555	57,69
5221	Belanja Jasa	17.345.064.000	11.022.812.759	-	11.022.812.759	63,55
5231	Belanja Pemeliharaan	11.335.334.000	9.254.127.714	-	9.254.127.714	81,64
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.796.063.000	10.879.761.664	200.000	10.879.561.664	49,92
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-	-	-
	Jumlah	84.447.682.000	52.817.452.458	200.000	52.817.252.458	62,54

1. Pengembalian akun Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp200.000,00 pada satker BPSDM Hukum dan HAM atas Belanja Perjalanan Biasa (524111) sebesar Rp200.000,00.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp21.690.946.
626,00

Realisasi Belanja Modal 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21.690.946.626,00 dan Rp5.963.134.995,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 72,51% dibandingkan 30 September TA 2023. Berikut tabel perbandingan realisasi belanja modal satker BPSDM Hukum dan HAM per 30 September 2024 dan 30 September 2023 :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.898.899.105	5.248.216.590	(6,66)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.792.047.521	714.918.405	95,74
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah	21.690.946.626	5.963.134.995	72,51

Kenaikan realisasi belanja modal disebabkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 95,74 dibandingkan tahun 2023.

Rincian Realisasi Belanja Modal per 30 September 2024

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi 30 September 2024	Naik (Turun) %
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	0,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.299.258.000	4.898.899.105	-	4.898.899.105	77,77
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000.000	16.792.047.521	-	16.792.047.521	20,99
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0	0,00
	Jumlah	86.299.258.000	21.690.946.626	-	21.690.946.626	25,13

Realisasi belanja modal tingkat satker BPSDM Hukum dan HAM baru mencapai 25,13% dari jumlah anggaran karena sedang dilakukan pembangunan Gedung di politeknik ke pembangunan Rektorat. Sedangkan pengadaan Peralatan dan Mesin mulai terealisasi pada triwulan III Tahun 2024.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 September 2024 dan 30 September 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp4.898.899.105,
00*

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp4.898.899.105,00 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 30 September TA 2023 sebesar (6,66%).

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 dan 30 September 2023

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.898.899.105	5.248.216.590	(6,66)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	0
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	0
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	0
Belanja Modal BLU	-	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	4.898.899.105	5.248.216.590	(6,66)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	4.898.899.105	5.248.216.590	(6,66)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp16.792.047.
521,00*

Realisasi Belanja Modal 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.792.047.521,00 dan Rp714.918.405,00. Terjadi kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 September TA 2024 disebabkan adanya penambahan gedung dan bangunan hingga 30 September 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.792.047.521	577.500.405	97
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	137.418.000	-100
Jumlah	16.792.047.521	714.918.405	96

Terjadi kenaikan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bagunan pada TA 2024 disebabkan penambahan gedung dan bangunan hingga 30 September 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	0%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0%
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0%
Jumlah Belanja	-	-	0%

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jalan, irigasi, jaringan dan lain-lain.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0
Belanja <i>Software</i>	-	-	0
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	0
Belanja Modal BLU	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0
Jumlah Belanja	-	-	100

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 30 September 2023 sebesar Rp0,00 dan 30 September 2022 sebesar Rp99.000.000,00.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp325.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp325.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	325.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	325.000.000	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.901.216.545,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing sebesar Rp1.901.216.545,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.901.216.545	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	1.901.216.545	-

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.901.216.545,00 merupakan saldo LS Bendahara di bank dan tunai.

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,00

Saldo Piutang PNB per 30 September TA 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp322.321.875,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNB
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Piutang PNB	-	323.941.583
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	(1.619.708)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	-	-
Jumlah	-	322.321.875

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR*
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
30 September 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
per 30 September 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

C.8 Beban Dibayar di Muka

*Beban Dibayar
di Muka
Rp0,00*

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Jenis	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Jenis	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp427.785.433,00*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp427.785.433,00 dan Rp158.136.788,00.

Rincian Persediaan per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

JENIS	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Barang Konsumsi	332.187.149	152.975.288
Barang untuk Pemeliharaan	95.598.284	5.161.500
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	427.785.433	158.136.788

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Non
Lancar
Rp0,00*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Non Lancar per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

*Tanah
Rp687.998.681.
000,00*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp687.998.681.000,00 dan Rp687.998.681.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27,

Rawasari, Jakarta Pusat.

- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ikhsan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Aset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.
- Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00 (masih dalam proses penggantian).

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp88.682.748.803,
00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp88.682.748.803,00 dan Rp83.693.591.148,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	Rp	83.693.591.148
Mutasi tambah:	Rp	6.088.072.655
Saldo Awal	Rp	960.415.550
Pembelian	Rp	4.898.899.105
Reklasifikasi Masuk	Rp	48.950.000
Transfer Masuk	Rp	16.566.000
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	163.242.000
Mutasi kurang:	Rp	(1.098.915.000)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	(1.072.830.000)
Transfer Keluar	Rp	(26.085.000)
Saldo per 30 September 2024	Rp	88.682.748.803
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp	(60.575.381.563)
Nilai Buku per 30 September 2024	Rp	28.107.367.240

Mutasi Tambah mencakup pembelian mesin-mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp6.088.072.655,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal

Penambahan nilai peralatan dan mesin dari koreksi Gedung dan Bangunan Kantor Permanen yang membentuk Peralatan dan Mesin dengan menggunakan pencatatan menu Saldo Awal.

1. Terdapat Saldo Awal pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp900.126.750,00 berupa 9 buah A.C. Split dan 36 buah A.C. Cassete.
2. Terdapat Saldo Awal pada BPSDM Hukum dan HAM Rp210.264.000,00 berupa 3 buah Submersible Pump.
3. Terdapat Saldo Awal pada BPSDM Hukum dan HAM Rp44.650.000,00 berupa Tabung Pemadam Api.

- Pembelian

1. Terdapat pembelian Alat Angkutan Darat Bermotor untuk mendukung operasional kantor senilai Rp340.880.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
2. Terdapat pembelian Alat Kantor untuk mendukung operasional kantor senilai Rp206.378.200,00 pada BPSDM Hukum dan HAM dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Rp80.500.000,00 berupa 7 buah Mesin Absensi;
 - b) Rp26.400.000,00 berupa 3 buah Alat Pencetak Label;
 - c) Rp99.478.200,00 berupa 2 buah Penangkal Petir.
3. Terdapat Pembelian barang intrakomptabel pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp1.617.400.000,00 berupa 150 buah Kasur /Spring Bed, 2 set Sofa, 1 buah Mesin Cuci, 16 buah A.C. Split, 6 buah Portable Air Conditioner (Alat Pendingin), 5 buah Microphone, 1 buah Camera Video.
4. Terdapat Pembelian Alat Studio senilai Rp596.500.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 buah Camera Digital, 2 buah LCD Monitor, dan 10 buah Clipp On.

5. Terdapat pembelian Komputer untuk mendukung operasional kantor senilai Rp460.000.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 20 unit Laptop.
 6. Terdapat Pembelian Peralatan Komputer untuk mendukung operasional kantor senilai Rp284.000.000,00 pada BPSDM Hukum
 7. Terdapat pembelian Stationary Generating Set 1 unit senilai Rp1.043.000.000,00, Mesin Pompa air PMK 6 buah senilai Rp76.740.905,00. AC Casette 3 buah senilai Rp144.000.000,00, LCD Monitor 10 Buah senilai Rp130.000.000,00, Gimbal Tripod 1 buah senilai Rp600.000.
- Reklasifikasi Masuk
Terdapat Reklasifikasi Masuk pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp 48.950.000,00 berupa Uninterruptible Power Supply (UPS).
 - Transfer Masuk
Terdapat Transfer Masuk pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp. 16.566.000,00 berupa 4 unit Meja Rapat.
 - Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif
Terdapat Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif senilai Rp163.242.000,00 berupa Perkakas Kantor Lainnya.

Mutasi Kurang sebesar (Rp1.072.830.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
 1. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp144.693.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM 1 unit Perkakas Kantor Lainnya.
 2. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp108.100.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 buah Lap Top dan 15 buah Note Book.
 3. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp 472.695.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 4 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
 4. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp 184.100.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 Unit Mobil Ambulance.

5. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp 163.242.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa Perkakas Kantor Lainnya.
- Transfer Keluar berasal dari Transfer Keluar senilai Rp26.085.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 buah Laptop.

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp331.773.750.
357,00

Saldo gedung dan bangunan per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah Rp331.773.750.357,00 dan Rp299.544.935.800,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	299.544.935.800
Mutasi tambah:	34.137.991.957
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	34.137.991.957
Mutasi kurang:	1.909.177.400
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	966.497.100
Koreksi Susulan	942.680.300
Saldo per 30 September 2024	331.773.750.357
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	(50.085.352.529)
Nilai Buku per 30 September 2024	281.688.397.828

Mutasi tambah sebesar Rp34.137.991.957,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP atas Bangunan Gedung Kantor Permanen.

Mutasi kurang sebesar Rp1.909.177.400,00 dengan rincian :

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas 1 unit Gedung Olah Raga Tetutup Permanen senilai Rp23.400.000,00 dan 1 Unit Bangunan Rumah Genset senilai Rp943.097.100,00.
- Koreksi Susulan atas 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp921.430.300,00 dan 1 unit Bangunan Gedung Pertemuan Permanen senilai Rp21.250.000,00.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp13.275.880.497,
00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp13.275.880.497,00 dan Rp12.401.733.397,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	12.401.733.397
Mutasi tambah:	2.181.319.100
Sado Awal	943.097.100
Reklasifikasi Masuk	831.972.000
Koreksi Susulan	406.250.000
Mutasi kurang:	1.307.172.000
Reklasifikasi Keluar	880.922.000
Koreksi Pencatatan	426.250.000
Saldo per 30 September 2023	13.275.880.497
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(7.797.280.703)
Nilai Buku per 30 September 2023	5.478.599.794

Mutasi Tambah sebesar Rp2.181.319.100,00 terdiri dari :

- Saldo Awal
Terdapat Saldo Awal Sebesar Rp943.097.100,00 pada jaringan atas Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil.
- Reklasifikasi Masuk
Terdapat Reklasifikasi Masuk Sebesar Rp831.972.000,00 pada Irigasi atas Saluran Pembuang Air Buangan Domestik.
- Koreksi Susulan
Terdapat Koreksi Susulan sebesar Rp406.250.000,00 pada Jaringan atas Instalasi Lain-lain.

Mutasi Kurang sebesar Rp1.307.172.000,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi Keluar
Terdapat Reklasifikasi Keluar sebesar Rp880.922.000,00 yaitu pada Irigasi atas Saluran Lalu Lintas Air senilai Rp831.972.000,00 dan pada Jaringan atas Instalasi Lain-lain senilai Rp48.950.000,00.
- Koreksi Pencatatan
Terdapat Koreksi Pencatatan sebesar Rp426.250.000,00 pada Jaringan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil 1 Unit senilai Rp 183.000.000,00;
 2. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil 1 Unit senilai Rp223.250.000,00;
 3. Instalasi Lain-lain senilai Rp20.000.000,00.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp1.351.026.622,
00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah Rp1.450.949.267,00 dan Rp1.450.949.267,00

Saldo per 01 Januari 2024	1.450.949.267
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 September 2024	1.450.949.267
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(18.480.000)
Nilai Buku per 30 September 2024	1.432.469.267

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, sebesar Rp1.450.949.267,00 milik Satker BPSDM Hukum dan HAM yang terdiri dari :

1. Buku senilai Rp1.379.249.267,00 dengan total sebanyak 6.127 buah buku.
2. Naskah (Manuskrip) / Asli senilai Rp48.220.000,00 dengan total sebanyak 1 buah naskah (Manuskrip) / asli.
3. Alat musik senilai Rp18.480.000,00 dengan total sebanyak 1 unit alat musik.
4. Pahatan senilai Rp5.000.000,00 dengan total sebanyak 1 buah pahatan.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp16.758.876.
814,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.758.876.814,00 dan Rp26.675.304.285,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan 30 September TA 2024 sebagai berikut:

1. Saldo Perolehan/Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas pekerjaan konstruksi Rektorat B Politeknik Tangerang senilai Rp144.000,00 ;
2. Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pekerjaan konstruksi Rektorat B Politeknik Tangerang senilai Rp16.758.732.814,00.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp118.476.494.795
,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September TA 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing Rp118.476.494.795,00 dan Rp108.100.234.001,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	88.682.748.803	60.575.381.563	28.107.367.240
2	Gedung dan Bangunan	331.773.750.357	50.085.352.529	281.688.397.828
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.275.880.497	7.797.280.703	5.478.599.794
4	Aset Tetap Lainnya	1.450.949.267	18.480.000	1.432.469.267
Total		435.183.328.924	118.476.494.795	316.706.834.129

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp1.476.732.100,
00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.476.732.100,00 dan Rp1.476.732.100,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.476.732.100
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 September 2024		Rp 1.476.732.100

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	Rp 1.476.732.100
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Saldo per 30 September 2024	Rp 1.476.732.100
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	Rp (1.278.704.800)
Nilai Buku per 30 September 2024	Rp 2.755.436.900

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa *software* sebesar Rp1.476.732.100,00 yang dicatat sebagai aset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

Aset Tak Berwujud pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.476.732.100,00 berupa :

1. CBHRIS BPSDM, Mengelola data kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM Rp31.000.000,00
2. Aplikasi CBT BPSDM, Pelaksanaan ujian Diklat berbasis IT Rp2.000.000,00
3. Video Conference, Pelaksanaan Wawancara Online Rp48.875.000,00
4. Aplikasi Barcode, Membuat barcode BMN untuk DIR Rp88.350.000,00
5. Internet Controller, Monitoring Jaringan internet di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Rp83.900.000,00.
6. Aplikasi SIEVA, Evaluasi Diklat berbasis IT Rp88.800.000,00
7. BPSDM BOX, Penyimpanan data online (Online Storage) Rp90.090.000,00
8. E-learning Metode pembelajaran Rp87.780.000,00
9. E-regis, Aplikasi registrasi pelaksanaan diklat secara elektronik Rp90.502.000,00
10. Jadwal, Monitor jadwal Widyaiswara pada Pelaksanaan Belajar Mengajar Rp93.857.000,00
11. E-sertifikat, Aplikasi Sertifikat Digital Rp88.660.000,00
12. Digital Library, Berisi e-book yang dapat diakses pegawai dan peserta diklat Rp82.445.000,00
13. Webinar kemenkumham, Aplikasi Pendukung proses pembelajaran e-learning Rp50.593.500,00
14. Aplikasi Uji Kompetensi BPSDM Hukum dan Ham, Untuk melakukan kegiatan Uji Kompetensi Rp96.500.000,00

15. Buku Elektronik, Berisi e-book yang dapat diakses pegawai dan peserta diklat Rp67.000.000,00
16. Modul Rumah Belajar Kemenkumham, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kemenkumham Rp288.300.000,00
17. E-Report sebesar Rp98.079.600,00.

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp2.649.718.096,
00

Saldo Aset Lain-lain per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah Rp2.649.718.096,00 dan Rp4.793.024.664,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses usulan penghapusan ke Sekretariat Jenderal dari BMN.

*Perbandingan Aset Lain-lain
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain	2.649.718.096	4.793.024.664
Jumlah	2.649.718.096	4.793.024.664

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	4.793.024.664
Mutasi tambah:	1.072.830.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	1.072.830.000
Mutasi kurang:	3.216.136.568
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan pe	163.242.000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.052.894.568
Saldo per 30 September 2024	2.649.718.096
Akumulasi Penyusutan 30 September 2023	(2.649.718.096)
Nilai Buku per 30 September 2024	-

Mutasi tambah sebesar Rp1.072.830.000,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
1. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp144.693.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM 1 unit Perkakas Kantor Lainnya.
 2. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp108.100.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 buah Lap Top dan 15 buah Note Book.

3. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp 472.695.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 4 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
4. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp 184.100.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 Unit Mobil Ambulance.
5. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp 163.242.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa Perkakas Kantor Lainnya.

Mutasi kurang sebesar Rp3.216.136.568,00 terdiri dari :

1. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif
Terdapat Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp163.242.000,00 berupa Perkakas Kantor Lainnya.
2. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan
Terdapat Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp3.052.894.568,00 terdiri dari 1 unit Mesin Fotocopy Lainnya, 8 unit Lemari Besi/Metal, 10 unit Filing Cabinet Besi, 1 unit Alat Penghancur Kertas, 18 unit Overhead Projector, 1 unit Laser Pointer, 16 unit LCD Projector/Infocus, 1 unit Focusing Screen/Layar LCD Projector, 2 unit Perkakas Kantor Lainnya, 17 unit Meja Kerja Besi/Metal, 552 unit Meja Kerja Kayu, 202 unit Kursi Besi/Metal, 48 unit Kursi Kayu, 55 unit Kasur/Spring Bed, 34 unit Nakas, 5 unit Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner, 2 unit Mesin Pel/Poles, 6 unit Mesin Pemotong Rumput, 31 unit A.C. Split, 5 unit Kipas Angin, 4 unit Mixer, 5 unit Televisi, 4 unit Amplifier, 5 unit Loudspeaker, 8 unit Wireless, 2 unit Megaphone, 17 unit Microphone, 15 unit Microphone Table Stand, 12 unit Dispenser, 3 unit Handy Cam, 1 unit Tensimeter, 75 unit P.C. Unit, 14 unit Lap Top, 15 unit Note Book, 36 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 3 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer), Sedan 1 unit, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) 2 Unit.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp3.928.422.896,
00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.928.422.896,00 dan Rp4.793.024.664,00 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Lain-lain	-	-	-
1	Software Komputer	1.476.732.100	1.278.704.800	198.027.300
2	ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah		1.476.732.100	1.278.704.800	198.027.300
B	Aset Lainnya	2.649.718.096	2.649.718.096	-
Jumlah		2.649.718.096	2.649.718.096	-
Total		4.126.450.196	3.928.422.896	198.027.300

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp3.490.653.723,
00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 masing-masing sebesar Rp3.490.653.723,00 dan Rp 5.346.451.257,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 1.263.300.178
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 326.137.000
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 1.901.216.545
Total		Rp 3.490.653.723

Adapun rincian dari utang kepada pihak ketiga antara lain :

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp1.263.300.178,00 merupakan belanja pegawai yang merupakan gaji induk bulan Juli yang sudah terbit SPM di bulan Juni namun belum SP2D.
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp326.137.000,00 merupakan belanja kontraktual dan non kontraktual yang belum SP2D.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp1.901.216.545,00.

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp343.676.193,00*

Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Nilai Utang Yang belum ditagihkan pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp343.676.193,00 merupakan nilai yang berada di rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas dan honorarium di lingkungan BPSDM.

Utang yang belum diterima tagihannya pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp343.676.193,00 merupakan belanja yang sudah dicatat dan karwas sudah terinput namun belum dibayarkan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp 33.180.657,00. Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 31 Desember TA 2023 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.27 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp325.000.000,
00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 masing-masing sebesar Rp325.000.000,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,00*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 September TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

C.29 Ekuitas

Ekuitas Ekuitas per 30 September 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah
Rp1.020.157.091 masing-masing sebesar Rp1.020.157.091.305,00 dan
.305,00 Rp1.011,523.714.801,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB Rp1.515.269.754,00 Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp1.515.269.754,00 dan Rp1.051.689.361,00. Berikut rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Sumber Daya Manusia	-	-	-
Pendapatan bagian Pemerintah Atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.515.269.754	1.051.689.361	69,41
Jumlah	1.515.269.754	1.051.689.361	69,41

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri dari:

1. Rp253.494.657,00 yang berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.
2. Rp906.300.000,00 yang berasal dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
3. Rp355.475.097,00 yang berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp16.798.687.531,00 Jumlah Beban Pegawai pada 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.749.601.108,00 dan Rp16.798.687.531,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	NAIK (TURUN) %
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(6.373.200)	-	-
Beban Gaji Pokok PNS	11.497.997.600	11.402.238.780	0,84
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(7.590)	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	174.128	182.653	(4,67)
Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	(637.320)	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	729.996.560	688.164.960	6,08
Beban Tunjangan Anak PNS	203.252.056	181.593.554	11,93
Beban Tunjangan Struktural PNS	263.925.000	270.310.000	(2,36)
Pengembalian Beban Tunjangan Struktural PNS	-	-	-
Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PNS	(370.000,00)	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.615.177.000	1.628.354.000	(0,81)
Beban Tunjangan PPh PNS	205.185.181	99.809.184	105,58
Beban Tunjangan Beras PNS	530.911.020	551.840.400	(3,79)
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	- 289.680	-	-
Beban Uang Makan PNS	1.159.531.000	1.342.471.000	(13,63)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(6.500.000)	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	223.205.000	277.520.000	(19,57)
Beban Gaji Pokok PPPK	510.117.600	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.793	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.053.600	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	4.534.400	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	49.400.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	20.856.960	-	-
Beban Uang Makan PPPK	77.613.000	-	-
Beban Uang Lembur	643.241.000	356.203.000	(44,62)
Beban Uang Lembur PPPK	11.602.000	-	-
Jumlah	17.749.601.108	16.442.484.531	7,95

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp949.722.936,00*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp949.722.936,00 dan Rp625.776.449,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan

pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	949.722.936	561.021.449	69,28
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	64.755.000	-
Jumlah Beban Persediaan	949.722.936	750.910.763	26,48

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp31.925.385.443,00

Beban Barang dan jasa pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.925.385.443,00 dan Rp50.487.063.952,00 .

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan belanja jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	13.659.782.253	8.470.445.134	(37,99)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	853.000	1.330.910	56,03
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	169.340.000	274.200.000	61,92
Beban Barang Operasional Lainnya	857.122.611	510.940.434	(40,39)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	4.608.028.644	4.485.421.554	(2,66)
Beban Honor Output Kegiatan	286.240.000	286.290.000	0,02
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.434.207.492	26.181.143.298	1.725,48
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	-	-	-
Beban Langganan Listrik	3.206.429.449	2.700.282.476	(15,79)
Beban Langganan Telepon	8.415.359	9.470.565	12,54
Beban Langganan Air	165.275.000	81.298.000	(50,81)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.942.858.685	1.809.196.081	7,39
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Sewa	1.499.085.300	1.705.651.100	13,78
Beban Jasa Profesi	3.472.500.000	3.711.300.000	6,88
Beban Jasa Lainnya	344.647.650	72.569.500	(78,94)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	325.000	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	270.600.000	187.199.900	(30,82)
Jumlah	31.925.385.443	50.487.063.952	58,14

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp8.900.960.647,
00

Beban pemeliharaan pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.900.960.647,00 dan Rp5.805.551.039,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.702.537.159	4.223.228.930	59
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	828.134.993	227.627.900	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	936.971.764	1.289.939.209	(27)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	433.316.731	64.755.000	100
Jumlah	8.900.960.647	5.805.551.039	53

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan Dinas
Rp21.969.173.331,
00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.057.246.664,00 dan Rp21.969.173.331,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	8.377.790.794	18.482.866.642	-54,67
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	- 200.000		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.100.000	140.030.000	-23,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.572.555.870	3.346.276.689	-23,12
Jumlah	11.057.246.664	21.969.173.331	-49,67

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Bantuan
Sosial
Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp11.428.941.279,
00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.428.941.279,00 dan Rp10.716.693.555,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 September 2023 dan 30 September 2022*

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.929.352.543	5.870.786.814	1
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.467.074.263	4.048.451.597	10
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	433.285.455	573.834.976	(24)
Beban Penyusutan Irigasi	13.157.354	9.904.429	33
Beban Penyusutan Jaringan	418.038.714	5.078.125	8.132
Beban Amortisasi Software	168.032.950	168.032.950	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	-	40.604.664	(100)
Jumlah	11.428.941.279	10.716.693.555	7

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
tertagih
(Rp1.619.708,00)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp1.619.708,00) dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 September 2024 dan 30 September 2023*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.619.708)	-	-
Jumlah	(1.619.708)	-	-

D.11 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.198.253.082,
00

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah Rp94.133.984,00 dan Rp524.799.072,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	180.060.099	93.577.664	92,42
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	13.964.000	556.320	2.410
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	(1.292.387.066)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	194.024.099	94.133.984	106

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

1. Realisasi pada Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp180.060.099,00 berupa lelang pada Akun :
 - Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp65.755.000,00 berupa lelang atas peralatan dan mesin.
 - Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp 114.305.000,00 berupa lelang 3 minibus.
2. Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp13.964.000,00 dikarenakan pengembalian belanja pegawai pada pengembalian gaji induk atas nama Wirdah Rahmi.

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 sebesar Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

*Rp1.011.523.714.
801,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.011.523.714.801,00 dan Rp985.775.385.185,00.

Surplus/Defisit

*LO
(Rp80.300.944.516
,00)*

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah defisit sebesar (Rp80.300.944.516,00) dan (Rp106.526.725.241,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesal
ahan Mendasar
Rp0,00*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 sebesar Rp0,00.

Penyesuaian

*Nilai Aset
Rp0,00*

E.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

*Persediaan
Rp0,00*

E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.6 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi
Reklasifikasi
Aset (Rp0,00)

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.7 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi
Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp0,00.

E.8 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
(Rp43.821.090,00)

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebesar (Rp43.821.090,00) dan Rp116.491.400,00. Koreksi Nilai Aset Non revaluasi pada 30 September 2024 pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar (Rp43.821.090,00). Dengan sebagai berikut :

Deskripsi	Nominal
Saldo Awal (Penambahan nilai peralatan dan mesin dari koreksi Gedung dan Bangunan Kantor Permanen yang membentuk Peralatan dan Mesin dengan menggunakan pencatatan menu Saldo Awal).	Rp15.341.118,00
Saldo Awal (Koreksi pencatatan nilai berkurang atas bangunan rumah genset yang membentuk instalasi gardu listrik distribusi kapasitas kecil).	Rp47.154.856,00
Saldo Awal (Koreksi nilai berkurang atas gedung auditorium dan GOR yang membentuk aset berupa tabung pemadam api.	Rp19.985.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	(Rp37.723.884,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Rumah Genset	(Rp936.000,00)
Total	Rp43.821.090,00

E.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp88.978.142.110,
00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp88.978.142.110,00 dan Rp97.216.338.814,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.000.054.779)
Ditagihkan ke Entitas Lain	90.994.500.014
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(16.303.125)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	88.978.142.110

E.11 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/ DKEL
(Rp2.000.054.779,
00)/
Rp90.994.500.014,
00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September TA 2024, DDEL sebesar (Rp2.000.054.779,00) sedangkan DKEL sebesar Rp 90.994.500.014,00.

E.12 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp0,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September TA 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Pengesahan
Hibah Langsung
dan
Pengembalian
Pengesahan
Hibah Langsung
Rp0,00*

E.13 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

*Ekuitas Akhir
Rp1.020.157.091.
305,00*

E.14 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.020.157.091.305,00 dan Rp976.581.490.158,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan penunjukan konsultan perencanaan pembangunan.
2. BPSDM Hukum dan HAM sedang melakukan proses peralihan nama sertifikat tanah untuk memenuhi ketentuan sertifikat, saat ini masih dalam proses menunggu berita acara hasil pengukuran tanah BPSDM Hukum dan HAM yang telah dilakukan oleh BPN Depok.
3. Aset tanah pada BPSDM Hukum dan HAM yang Sertifikatnya Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (108266) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 14/10/24 6:22 AM

Tgl Cetak : 14/10/24 12:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	325,000,000	0	325,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,901,216,545	0	1,901,216,545	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	323,941,583	(323,941,583)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,619,708)	1,619,708	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	322,321,875	(322,321,875)	(100.00)
Persediaan	427,785,433	158,136,788	269,648,645	170.52
JUMLAH ASET LANCAR	2,654,001,978	480,458,663	2,173,543,315	452.39
ASET TETAP				
Tanah	687,998,681,000	687,998,681,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	88,682,748,803	83,693,591,148	4,989,157,655	5.96
Gedung dan Bangunan	331,773,750,357	299,544,935,800	32,228,814,557	10.76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,275,880,497	12,401,733,397	874,147,100	7.05
Aset Tetap Lainnya	1,450,949,267	1,450,949,267	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16,758,876,814	26,675,304,285	(9,916,427,471)	(37.17)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(118,476,494,795)	(108,100,234,001)	(10,376,260,794)	9.60
JUMLAH ASET TETAP	1,021,464,391,943	1,003,664,960,896	17,799,431,047	1.77
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,476,732,100	1,476,732,100	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	12,391,866,906	(12,391,866,906)	(100.00)
Aset Lain-lain	2,649,718,096	4,793,024,664	(2,143,306,568)	(44.72)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,928,422,896)	(5,903,696,514)	1,975,273,618	(33.46)
JUMLAH ASET LAINNYA	198,027,300	12,757,927,156	(12,559,899,856)	(98.45)
JUMLAH ASET	1,024,316,421,221	1,016,903,346,715	7,413,074,506	0.73
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,490,653,723	5,346,451,257	(1,855,797,534)	(34.71)
Utang Yang Belum Ditagihkan	343,676,193	0	343,676,193	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	33,180,657	(33,180,657)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	325,000,000	0	325,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,159,329,916	5,379,631,914	(1,220,301,998)	(22.68)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,159,329,916	5,379,631,914	(1,220,301,998)	(22.68)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,020,157,091,305	1,011,523,714,801	8,633,376,504	0.85
JUMLAH EKUITAS	1,020,157,091,305	1,011,523,714,801	8,633,376,504	0.85
JUMLAH EKUITAS	1,020,157,091,305	1,011,523,714,801	8,633,376,504	0.85

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (108266) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Tgl Data : 14/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 14/10/24 12:10 PM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,024,316,421,221	1,016,903,346,715	7,413,074,506	0.73

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DEPOK, 14 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARA

JUSMAN ALI
NIP 197405102000121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12
SATUAN KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 108266

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 1:24 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	996,300,000	2,000,054,779	1,003,754,779	201	1,078,539,000	1,051,689,361	26,849,639	98
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	996,300,000	2,000,054,779	1,003,754,779	201	1,078,539,000	1,051,689,361	26,849,639	98
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	996,300,000	2,000,054,779	1,003,754,779	201	1,078,539,000	1,051,689,361	26,849,639	98
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	192,050,458,000	90,994,500,014	(101,055,957,986)	47	184,131,441,000	98,268,028,175	85,863,412,825	53
1. Belanja Pegawai	21,303,518,000	16,486,300,930	(4,817,217,070)	77	20,367,931,000	15,578,475,683	4,789,455,317	76
2. Belanja Barang	84,447,682,000	52,817,252,458	(31,630,429,542)	63	115,752,840,000	76,726,417,497	39,026,422,503	66
3. Belanja Modal	86,299,258,000	21,690,946,626	(64,608,311,374)	25	48,010,670,000	5,963,134,995	42,047,535,005	12
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12
SATUAN KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 108266

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 1:24 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	192,050,458,000	90,994,500,014	(101,055,957,986)	47	184,131,441,000	98,268,028,175	85,863,412,825	53
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DEPOK, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARA

JUSMAN ALI
NIP 197405102000121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (108266) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 1:21 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,515,269,754	1,009,718,698	505,551,056	50.069
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,515,269,754	1,009,718,698	505,551,056	50.069
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,515,269,754	1,009,718,698	505,551,056	50.069
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	17,749,601,108	16,798,687,531	950,913,577	5.661
Beban Persediaan	949,722,936	561,021,449	388,701,487	69.285
Beban Barang dan Jasa	31,925,385,443	50,487,063,952	(18,561,678,509)	(36.765)
Beban Pemeliharaan	8,900,960,647	5,805,551,039	3,095,409,608	53.318
Beban Perjalanan Dinas	11,057,246,664	21,969,173,331	(10,911,926,667)	(49.669)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (108266) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 1:21 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	11,428,941,279	10,716,693,555	712,247,724	6.646
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,619,708)	0	(1,619,708)	()
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	82,010,238,369	106,338,190,857	(24,327,952,488)	(22.878)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(80,494,968,615)	(105,328,472,159)	24,833,503,544	(23.577)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	180,060,099	(1,198,809,402)	1,378,869,501	(115.02)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	180,060,099	93,577,664	86,482,435	92.418
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1,292,387,066	(1,292,387,066)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,964,000	556,320	13,407,680	2,410.066
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,964,000	556,320	13,407,680	2,410.066
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	194,024,099	(1,198,253,082)	1,392,277,181	(116.192)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(80,300,944,516)	(106,526,725,241)	26,225,780,725	(24.619)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(80,300,944,516)	(106,526,725,241)	26,225,780,725	(24.619)

JUSMAN ALI
NIP 197405102000121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (108266) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 16/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:56 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,011,523,714,801	985,775,385,185	25,748,329,616	2.61
SURPLUS/DEFISIT-LO	(80,300,944,516)	(106,526,725,241)	26,225,780,725	(24.62)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(43,821,090)	116,491,400	(160,312,490)	(137.62)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(43,821,090)	116,491,400	(160,312,490)	(137.62)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	88,978,142,110	97,216,338,814	(8,238,196,704)	(8.47)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	8,633,376,504	(9,193,895,027)	17,827,271,531	(193.9)
EKUITAS AKHIR	1,020,157,091,305	976,581,490,158	43,575,601,147	4.46

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DEPOK, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARA

JUSMAN ALI
NIP 197405102000121001